

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI LAMPUNG**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1    Tugas, Pokok dan Fungsi OPD.....	1
1.2    Struktur Organisasi OPD.....	17
<b>BAB II    PERJANJIAN KINERJA ESELON II</b>	
2.1    Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon II.....	18
2.2    Lampiran Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon II.....	19
<b>BAB III    PERJANJIAN KINERJA ESELON II DENGAN ESELON III</b>	
3.1    Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Sekretaris.....	20
3.2    Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Politik Dalam Negeri.....	22
3.3    Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.....	24
3.4    Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.....	26
3.5    Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.....	28
<b>BAB IV    PERJANJIAN KINERJA ESELON III DENGAN ESELON IV</b>	
4.1    Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian.....	30
<b>BAB V    PENUTUP</b>	32



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### 1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 04 Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 18 September 2019 Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi.

#### 2. Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumus kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik, di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksana kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksana koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- d. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - c. Sub Bagian Program dan Anggaran.
3. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi :
  - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  - b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi :
  - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
  - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
5. Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi:
  - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
  - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.



6. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
  - a. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; dan
  - b. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dipimpin oleh **Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si** yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

#### 1. Kepala Badan

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumus kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksana kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksana koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan



- ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
  - f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik; dan;
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

## 2. Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas pokoknya *Sekretaris*, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sekretariat, membawahi :

### a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan aset serta pengelolaan kepegawaian.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan urusan persuratan;
- 2) Melaksanakan urusan tata usaha pimpinan;
- 3) Melaksanakan urusan kearsipan;
- 4) Melaksanakan urusan hubungan masyarakat;
- 5) Melaksanakan urusan protokol;
- 6) Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- 7) Melaksanakan urusan pengelolaan aset;
- 8) Melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



## 2. **Sub Bagian Keuangan dan Aset;**

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan aset, akuntansi, serta verifikasi dan pembukuan.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan urusan pengelolaan keuangan;
- 2) Melakukan urusan penatausahaan keuangan dan aset;
- 3) Melaksanakan pelaporan aset/barang inventaris;
- 4) Melakukan urusan akuntansi;
- 5) Melakukan urusan verifikasi dan pembukuan;
- 6) Menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## 3. **Sub Bagian Program dan Anggaran**

Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

Rincian tugas Sub Bagian Program dan Anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- 2) Melaksanakan penyiapan pengelolaan data informasi;
- 3) Melaksanakan penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- 4) Melaksanakan penyiapan penyusunan laporan kinerja;
- 5) Menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## 3. **Bidang Politik Dalam Negeri**

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan



pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya *Bidang Politik Dalam Negeri*, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; dan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :

**1. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;**

Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan



penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Rincian tugas Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **2. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi**

Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.



Rincian tugas Sub-Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 6) melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa**

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.



Dalam melaksanakan tugasnya ***Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa***, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan diwilayah provinsi;
- b. Perumus kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan diwilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan diwilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhineka tunggal ikadan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

***Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa***, membawahi :

**1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;**

Sub-Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program, perumusan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

Rincian tugas Sub-Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;



- 4) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## 2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa

Sub-Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

Rincian tugas Sub-Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



## 5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya ***Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan***, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan



- kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; dan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

***Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan***, membawahi :

**1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;**

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan.

Rincian tugas Sub-Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;



- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.**

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Rincian tugas Sub-Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



## **6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.



Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi :

**1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;**

Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

Rincian tugas Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing,



tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; dan;

- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **2. Sub Bidang Penanganan Konflik.**

Sub-Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

Rincian tugas Sub-Bidang Penanganan Konflik adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang penanganan konflik;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang penanganan konflik;
- 5) Melaksanakan penyiapan penanganan konflik;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang penanganan konflik; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing bagian atau bidang merupakan sub sistem dari organisasi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung yang saling berkaitan dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta keterpaduan dan sinergi dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.

Masing-masing bagian atau bidang merupakan sub system dari organisasi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung yang saling berkaitan dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta keterpaduan dan sinergi dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Keterkaitan dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

**KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK DAERAH**  
Drs MUHAMMAD FIRSADA, M.Si  
19870515 198901 1 001  
S-2 ILMU ADMINSTRASI  
PEMBINA UTAMA MADYA IV/d

**SEKRETARIS BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK DAERAH**  
HERMANSYAH SALEH, S.STP., M.H.

**KEPALA BIDANG  
IDEOLOGI, WAWASAN  
KEBANGSAAN DAN  
KARAKTER BANGSA**  
Drs MUHAMMAD ALHUSNURISKI,

**KEPALA BIDANG  
KEWASPADAAN NASIONAL  
DAN PENANGANAN  
KONFLIK**  
CHRISTIAN THOLALU, S.Sos., M.M.

**KEPALA BIDANG  
KETAHANAN EKONOMI,  
SOSIAL, BUDAYA, AGAMA,  
DAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN**  
RAHMAD HARIYADI, S.Sos, M.Si

**KEPALA BIDANG POLITIK  
DALAM NEGERI**  
HERIZA KURNIAWAN, SH, MIP

**KEPALA SUB BAGIAN  
UMUM DAN KEPEGAWAIAN**  
EMI MURNINGSIH, S.STP, MT

**KEPALA SUB BAGIAN  
KEUANGAN DAN ASET**  
MOLI PERANI, SH, MM

**KEPALA SUB BAGIAN  
PROGRAM DAN ANGGARAN**  
YOHANES TRIMANSYAH, BA.

**KEPALA SUB BIDANG  
IDEOLOGI DAN WAWASAN  
KEBANGSAAN**  
BODI SURANTO, SE., MM.

**KEPALA SUB BIDANG  
BELA NEGARA DAN  
KARAKTER BANGSA**  
Drs FARDINANSYAH, MM

**KEPALA SUB BIDANG  
KEWASPADAAN DINI DAN  
KERJASAMA INTELEJEN**  
AKHMAD SALIM INDRA, S.Sos, MM

**KEPALA SUB BIDANG  
PENANGANAN KONFLIK**  
FEBRI FERDYAN, S.I.P.

**KEPALA SUB BIDANG  
KETAHANAN EKONOMI,  
SOSIAL, BUDAYA DAN  
AGAMA**  
MATHOFANI, S.Sos

**KEPALA SUB BIDANG  
ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN**  
Dra. TAVINAARAFAH,

**KEPALA SUB BIDANG  
PENDIDIKAN POLITIK DAN  
PENINGKATAN DEMOKRASI**  
RIFAI, SH

**KEPALA SUB BIDANG  
FASILITASI KELEMBAGAAN  
Pemerintahan,  
PERWAKILAN DAN PARTAI  
POLITIK**  
RAHMAT YUDHA KSATRIA, S.I.P., M.H.

**Analisis Tata Usaha**  
YUDHI IRWANDI, SH  
Drs MUHAMAD SUHARTO, MM

**Analisis Data dan Informasi**  
NELLY UTINARIA, S.E

**Pengelola Surat**  
Belum ada pegawai

**Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor**  
ABDAN, SE

**Pengadministrasi Umum**  
FAJAR WAHYUDI,  
MIRWANTO,  
TAJUDDIN,

**Pramu Bakti**  
SUGIANTO,

**Pengemudi**  
Belum ada pegawai

**Analisis Laporan Keuangan**  
RIKI IRAWAN, S.H

**Analisis Transaksi Keuangan**  
RUZHAN HAFANI, S.I.Kom

**Bendahara**  
Belum ada pegawai

**Pengelola Keuangan**  
Belum ada pegawai

**Pengadministrasi Keuangan**  
SAPRI,  
ELMI,

**Analisis Perencanaan**  
Belum ada pegawai

**Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran**  
Belum ada pegawai

**Pengadministrasi Perencanaan dan Program**  
AHMAD KUNARDI,  
ADI MULA PUTRA,  
UMMI SHOFIATI,

**Analisis Wawasan Kebangsaan**  
SRI HARYATUN, S.IP  
Drs. YUDA SETIAWAN, M.M.

**Analisis Ideologi**  
Belum ada pegawai

**Pengelola Data**  
Belum ada pegawai

**Analisis Dialog dan Wawasan Multikultural**  
SYAMSIR, S.IP.

**Analisis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat**  
Belum ada pegawai

**Pengadministrasi Umum**  
HUDAWI,  
NUNUNG RESMIHATI,

**Analisis Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing**  
NURDIANSYAH ADI, S.H

**Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat**  
SUKRISMANA, S.Sos  
ABRAHAM ABKAMAN, S.STP.MH

**Pengadministrasi Umum**  
JAMALUDIN,

**Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan**  
KEMAS DEDY KURNIAWAN, S.IP

**Analisis Program Kerjasama Lembaga Masyarakat**  
RAHMALIA, S.H.

**Pengadministrasi Umum**  
ROMLI,

**Analisis Budaya Keagamaan**  
NITA DWI SAFITRI, S.A.B.

**Analisis Sosial Budaya**  
ABDULLAH, SE

**Pengadministrasi Umum**  
Belum ada pegawai

**Analisis Organisasi Masyarakat**  
Belum ada pegawai

**Analisis Pemberdayaan Masyarakat**  
ELSIRITA, S.Sos., M.M.

**Pengadministrasi Umum**  
MOCHAMAD FAISOL,

**Analisis Pemilihan Umum**  
Belum ada pegawai

**Analisis Politik Dalam Negeri**  
MARIA VIVERA, S.Si.

**Pengadministrasi Umum**  
SULISDIANTO,

**Analisis Partai politik**  
SOPHIA MAYANG SARI, S.E

**Analisis Politik Hukum dan Keamanan**  
RACHMAT TRI SURYANTO, S.E.

**Pengadministrasi Umum**  
Belum ada pegawai

## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA ESELON II**



## GUBERNUR LAMPUNG

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. M. FIRSADA, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **ARINAL DJUNAI DI**  
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**

GUBERNUR LAMPUNG,

KEPALA BADAN,

**ARINAL DJUNAI DI**

**Drs. M. FIRSADA, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19670515 198901 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	87.5%
2.	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	72.75

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 19,708,473,177.15	APBD
2 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1,940,350,600.00	APBD
3 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 1,092,819,000.00	APBD
4 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 258,433,000.00	APBD
5 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp. 1,170,394,600.00	APBD
6 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 824,509,000.00	APBD
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 24,994,979,377.15</b>	

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,  
GUBERNUR LAMPUNG



**ARINAL DJUNAIDI**

Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN,



**Drs. M. FIRSADA, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19670515 198901 1 001

## **BAB III**

# **PERJANJIAN KINERJA ESELON II DENGAN ESELON III**



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

**TELUKBETUNG**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BIDANG IDEOLOGI, WASBANG DAN KARAKTER BANGSA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAPRUL AL HADI, S.STP, MM**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN  
KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. M. FIRSADA, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA BADAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN**

**Drs. M. FIRSADA, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG IDEOLOGI,  
WAWASAN KEBANGSAAN DAN  
KARAKTER BANGSA**

**SAPRUL AL HADI, S.STP, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19801228 199912 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

**TELUKBETUNG**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERIZA KURNIAWAN, SH, M.IP**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. M. FIRSADA, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA BADAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN**

**Drs. M. FIRSADA, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG  
POLITIK DALAM NEGERI**

**HERIZA KURNIAWAN, SH, M.IP**  
Pembina  
NIP. 19780710 200501 1 012



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

**TELUKBETUNG**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA,  
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMAD HARIYADI, S. Sos. M.Si**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,  
BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. M. FIRSADA, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA BADAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN**

**Drs. M. FIRSADA, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG KETAHANAN  
EKOSOS, BUDAYA, AGAMA DAN  
ORMAS**

**RAHMAD HARIYADI, S. Sos. M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670107 198909 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

**TELUKBETUNG**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **CHRISTIAN THALOLU, S.Sos. M.Si**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. M. FIRSADA, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA BADAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BADAN**

**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK**

**Drs. M. FIRSADA, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670515 198901 1 001

**CHRISTIAN THALOLU, S.Sos. M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710213 199703 1 004



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH**  
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. M. FIRSADA, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA BADAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN**

**Drs. M. FIRSADA, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

**SEKRETARIS**

**HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19760710 199603 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BIDANG IDEOLOGI, WASBANG DAN KARAKTER BANGSA**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	30%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1,940,350,600.00	APBD
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 1,940,350,600.00</b>	<b>APBD</b>

Telukbetung, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

**KEPALA BADAN,**



**Drs. M. FIRSADA, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19670515 198901 1 001

**Pihak Pertama,**

**KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WASBANG DAN KARAKTER BANGSA**



**SAPRUL AL HADI, S.STP, MM**  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19801228 199912 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BIDANG KETAHANAN EKOSOS, BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	30%
2	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	30%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 258,433,000.00	APBD
2 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp. 1,170,394,600.00	APBD
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 1,428,827,600.00</b>	<b>APBD</b>

Telukbetung, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**

**KEPALA BADAN,**

**KEPALA BIDANG KETAHANAN EKOSOS,  
BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS**




**Drs. M. FIRSADA, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19670515 198901 1 001

**RAHMAD HARIYADI, S. Sos. M.Si**  
 PEMBINA Tk. I  
 NIP. 19670107 198909 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	prosentase koordinasi, pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	30%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 824,509,000.00	APBD
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 824,509,000.00</b>	<b>APBD</b>

Telukbetung, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**

**KEPALA BADAN,**

**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN  
NASIONAL DAN PENANGANAN  
KONFLIK**



**Drs. M. FIRSADA, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19670515 198901 1 001

**CHRISTIAN THALOLU, S.Sos. M.Si**  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19710213 199703 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan dan pengembangan etika serta budaya politik	prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	30%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 1,092,819,000.00	APBD
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 1,092,819,000.00</b>	<b>APBD</b>

Telukbetung, Januari 2023

**Pihak Kedua ,**

**Pihak Pertama,**

**KEPALA BADAN,**

**KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**




**Drs. M. FIRSADA, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19670515 198901 1 001

**HERIZA KURNIAWAN, SH, M. IP**  
PEMBINA  
NIP. 19780710 200501 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT BADAN**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan kepegawaian, penyusunan program anggaran dan pengelolaan keuangan dan aset	Prosentase pemenuhan dokumen pelayanan umum dan kepegawaian, penyusunan program anggaran dan pengelolaan keuangan dan aset tepat waktu	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 19,708,473,177.15	APBD
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 19,708,473,177.15</b>	<b>APBD</b>

Telukbetung, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

**KEPALA BADAN**



**Drs. M. FIRSADA, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19670515 198901 1 001

**Pihak Pertama,**

**SEKRETARIS**



**HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH**  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19760710 199603 1 001

## **BAB IV**

### **PERJANJIAN KINERJA ESELON III DENGAN ESELON IV**



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

**TELUKBETUNG**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EMI MURNINGSIH, S.STP., MT**  
Jabatan : **KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH**  
Jabatan : **SEKRETARIS**  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,

**SEKRETARIS**

**HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH**

Pembina Tk. I  
NIP. 19760710 199603 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB. BAGIAN UMUM  
DAN KEPEGAWAIAN**

**EMI MURNINGSIH, S.STP., MT**

Pembina  
NIP. 19830528 200112 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN**

No	Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<p><b>Meningkatnya keselarasan laporan dan pengelola aset</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</li> <li>- tersusunnya laporan dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD</li> </ul>	<p><b>Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset</b></p> <p>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</p> <p>Jumlah dokumen barang dan pengelolaan aset milik daerah</p>	<p><b>94%</b></p> <p>4 laporan</p> <p>8 laporan</p>
2	<p><b>Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</li> <li>- Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>- terlaksananya ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi</li> </ul>	<p><b>Prosentase layanan administrasi kepegawaian</b></p> <p>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi</p>	<p>85%</p> <p>5 orang</p> <p>154 org/keg</p> <p>120 org/hr/keg</p>
3	<p><b>Meningkatnya layanan administrasi umum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>- tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</li> <li>- tersedianya peralatan rumah tangga</li> <li>- tersedianya barang cetak dan penggandaan</li> <li>- tersediannya bahan/material</li> <li>- tersediannya fasilitasi kunjungan tamu</li> <li>- tersedianya koordinasi dan konsultasi</li> </ul>	<p><b>Prosentase layanan administrasi umum</b></p> <p>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan</p> <p>jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</p> <p>jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan</p> <p>jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan</p> <p>Jumlah paket bahan /material yang disediakan</p> <p>Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu</p> <p>jumlah koordinasi dan konsultasi</p>	<p><b>85%</b></p> <p>12 paket</p> <p>36 paket</p> <p>12 paket</p> <p>12 paket</p> <p>12 paket</p> <p>12 laporan</p> <p>60 laporan</p>
4	<p><b>Meningkatnya layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</li> <li>- tersedianya layanan umum kantor</li> </ul>	<p><b>Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b></p> <p>jumlah bulan layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang ditingkatkan</p> <p>Jumlah bulan layanan jasa umum kantor</p>	<p><b>80%</b></p> <p>12 laporan</p> <p>12 laporan</p>
5	<p><b>Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> </ul>	<p><b>Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah</b></p> <p>jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara</p>	<p><b>65%</b></p> <p>6 unit</p>

- tersedianya jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah ruang pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8 unit
- tersedianya jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	80 unit

<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 35,962,000.00</b>	<b>APBD</b>
1) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 24,278,000.00	APBD
2) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 11,684,000.00	APBD
<b>2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 54,400,000.00</b>	<b>APBD</b>
1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 27,000,000.00	APBD
2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 15,400,000.00	APBD
3) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 12,000,000.00	APBD
<b>3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 1,481,862,140.00</b>	<b>APBD</b>
1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Rp. 11,243,200.00	APBD
2) Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 350,052,000.00	APBD
3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 8,000,000.00	APBD
4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 20,176,940.00	APBD
5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Rp. 108,356,000.00	APBD
6) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 32,400,000.00	APBD
7) Sub Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp. 951,634,000.00	APBD
<b>4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp. 525,952,000.00</b>	<b>APBD</b>
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 282,452,000.00	APBD
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 243,500,000.00	APBD
<b>5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 400,230,000.00</b>	<b>APBD</b>
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 197,770,000.00	APBD

2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	181,900,000.00	APBD
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	20,560,000.00	APBD
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp.</b>	<b>2,498,406,140.00</b>	<b>APBD</b>

Telukbetung, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

**SEKRETARIS**



**HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH**  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19760710 199603 1 001

**Pihak Pertama,**

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM &  
KEPEGAWAIAN**



**EMI MURNINGSIH, S.STP., MT**  
PEMBINA  
NIP. 19830528 200112 2 002